



Persepsi Mahasiswa Generasi Z Terhadap Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Negeri Semarang

Giri Harto Wiratomo¹, Kokom Komalasari², Rahmat³, Iim Siti Masyitoh⁴
^{1,2,3,4} Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.15294/1f31t248>

Submitted: 2025-01-13. Accepted: 2025-02-25. Published: 2025-02-26

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi mahasiswa generasi Z terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Semarang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara terstruktur dilakukan terhadap 487 responden mahasiswa yang terdiri atas 114 laki-laki dan 373 perempuan berasal dari 9 fakultas di Universitas Negeri Semarang angkatan masuk 2022, 2023, dan 2024. Dokumentasi dengan menggunakan kajian studi pustaka yang relevan. Indikator yang diteliti yaitu 1) permasalahan yang dihadapi mahasiswa, 2) materi pembelajaran, 3) metode pembelajaran, dan 4) efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) permasalahan yang dihadapi responden sekarang ini yaitu sifat individualis, pelanggaran terhadap tata tertib, kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai moral, dan sosial. Sementara itu, 2) materi pembelajaran yang penting menurut persepsi responden yaitu materi bela negara, hak asasi manusia, dan demokrasi., 3) persepsi responden terhadap metode/model pembelajaran yang disukai yaitu diskusi berbasis opini dalam bentuk esai, metode tatap muka (luring), pembelajaran kooperatif, dan pendekatan aktif yang mendorong mahasiswa menjadi kritis, 4) persepsi responden terhadap efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki skor cukup positif berada pada interval 7-9. Kesimpulan penelitian ini yaitu persepsi responden terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan cukup positif dengan keinginan responden untuk memberikan pelatihan pendidikan karakter dan kurikulum kewarganegaraan global.

Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Generasi Z, Pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Tinggi

ABSTRACT

Civic Education plays a crucial role in shaping citizens who understand their rights and obligations. This study aims to analyze the perceptions of Generation Z students toward Civic Education learning at Universitas Negeri Semarang. The research employs a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Structured interviews were conducted with 487 student respondents, consisting of 114 males and 373 females from nine faculties at Universitas Negeri Semarang, who enrolled in the 2022, 2023, and 2024 academic years. Documentation was supported by a review of relevant literature studies. The research focused on four key indicators: (1) challenges faced by students, (2) learning materials, (3) teaching methods, and (4) the effectiveness of Civic Education learning. The results of this study reveal that the current challenges faced by respondents include individualism, violations of rules and regulations, and a lack of respect for moral and social values. According to respondents, the most important learning materials are

*Correspondence Address

E-mail: girihw@upi.edu
kokom@upi.edu

national defense, human rights, and democracy. Respondents' preferred teaching methods include opinion-based discussions in essay format, face-to-face (offline) learning, cooperative learning, and active approaches that encourage critical thinking. Respondents perceive the effectiveness of Citizenship Education learning as moderately positive, with scores ranging from 7 to 9 on a scale. The study concludes that respondents' perceptions of Citizenship Education are generally positive. They express a desire for character education training and a curriculum that incorporates global citizenship principles.

Keywords: Perception, Students, Generation Z, Learning, Citizenship Education, Higher Education

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan untuk menghadapi berbagai tantangan global. Galston (2007) melihat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai peningkatan pengetahuan terutama tentang lembaga politik dan sejarah bangsa, dan tujuannya untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, agensi, dan motivasi melalui pengalaman langsung dengan isu dan tindakan kewarganegaraan. Namun demikian dalam kondisi praksisnya, berbagai permasalahan yang menyangkut moralitas dan pelanggaran etika masih banyak terjadi di keseharian mahasiswa.

Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai tantangan masa depan. Cogan (2000) menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam mempersiapkan warga negara muda, agar setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. Branson (2003) menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif yaitu mendorong partisipasi dalam politik dan masyarakat, memberikan pengalaman langsung seperti simulasi dan proyek pembelajaran berbasis layanan, serta menekankan prinsip-prinsip demokrasi. Westheimer & Kahne (2004) menjelaskan tiga konsep warga negara yang baik yaitu bertanggung jawab secara pribadi,

partisipatif, dan berorientasi pada keadilan. Galston (2007) menawarkan perlunya transisi dari model Pendidikan Kewarganegaraan tradisional ke kewarganegaraan baru yang secara signifikan memperluas definisi partisipasi kewarganegaraan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan antara pembelajaran yang menekankan perolehan pengetahuan melalui instruksi guru dan pedagogi model atas-bawah ataukah model bawah atas yang menekankan praksis, interaksi dengan perangkat, objek, pengalaman, dan orang-orang sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman.

Tantangan kebangsaan yang dihadapi mahasiswa abad 21 ini semakin besar. Tantangan ini seperti krisis karakter yang membuat Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat relevan untuk diajarkan di pendidikan tinggi. Selain itu, Campbell (2019) menjelaskan masih terdapat kesan keliru bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak memiliki pengaruh terhadap partisipasi kewarganegaraan dan politik. Hidayah & Ulfa (2020), menjelaskan upaya pengembangan keterampilan berpikir kritis warga negara muda melalui Pendidikan Kewarganegaraan di pendidikan tinggi, yaitu pertama, menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, kontekstual, konstruktivisme, dan pendekatan open-ended. Kedua, media yang dikembangkan adalah strategi *blended learning* dan *e-learning*. Ketiga, sumber belajar berupa daring dan luring.

Penelitian sebelumnya tentang persepsi mahasiswa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan masih kurang dilakukan, penelitian yang sejenis yaitu Sujana, *et al* (2020) yang mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan

tinggi yang memiliki posisi dan peran yang strategis dalam membangkitkan perasaan kebangsaan Indonesia dan cinta tanah air Indonesia (dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, komitmen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memiliki komitmen ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada setiap mahasiswa (generasi *millennial*) menggunakan metode penelitian kuantitatif metode survey yang menunjukkan hasil penelitian menunjukkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi dan peran yang sangat penting (70,7%) dan masih diminati (50,7%) oleh mahasiswa (generasi *millennial*). Namun media pembelajaran (66,7%) masih perlu disesuaikan dengan karakteristik generasi *millennial* yang cenderung menggunakan teknologi. Perbedaan penelitian ini dengan Sujana, *et al* (2020) yaitu responden yang diteliti generasi *millennial* dan generasi Z. Kemudian, penelitian yang lain hanya fokus terhadap mata kuliah Pendidikan Pancasila, seperti penelitian Yusra, *et al* (2024) yang menganalisis persepsi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap pembelajaran Pendidikan Pancasila menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik survei yang memperlihatkan bahwa persepsi mahasiswa tergolong baik walaupun Pendidikan Pancasila masih dianggap tidak mudah jika dibandingkan dengan mata kuliah lain. Lebih lanjut, penelitian Novitasari, *et al* (2021) hanya mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap penilaian teman sejawat secara daring pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Tidar dengan indikator persepsi mahasiswa dibatasi pada lima aspek yaitu urgensi, efektivitas, keterbacaan, keterpahaman dan efisiensi dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang positif terhadap penilaian sejawat secara daring pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Secara generasi mahasiswa yang diteliti berusia 18-22 tahun

yang termasuk dalam kategori Generasi Z (Gen Z). Pengertian Generasi Z menurut Katz, *et al.* (2021) yaitu mereka yang lahir sejak pertengahan 1990-an dan merupakan generasi pertama yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Lebih lanjut, Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai institusi pendidikan tinggi di Jawa Tengah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Saddam, *et al* (2018) menjelaskan UNNES dinobatkan sebagai universitas konservasi dan visinya hingga 2040 menjadi universitas konservasi bereputasi internasional. Semisal dukungan institusi tersebut terhadap pengembangan akademik melalui Kurikulum Merdeka Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan model pembelajaran *projek based learning* dan *problem based learning*. Lebih lanjut, Campbell (2019) dalam penelitiannya menemukan empat aspek sekolah yang memengaruhi pembelajaran dan keterlibatan kewarganegaraan yaitu pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran berbasis layanan (*service learning*), dan budaya sekolah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Yin, 2014). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur terhadap 487 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Negeri Semarang yang mengikuti mata kuliah wajib Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2024 tentang persepsi responden terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Responden terdiri atas 114 laki-laki dan 373 perempuan dengan angkatan masuk tahun 2022 (2 responden), 2023 (200 responden), dan 2024 (285 responden). Indikator persepsi yang diteliti yaitu 1) permasalahan yang dihadapi mahasiswa, 2) materi pembelajaran, 3) metode pembelajaran, dan 4) efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memandang peran penting Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter. Mayoritas responden menyarankan perlunya penguatan pendidikan karakter sebagai salah satu bentuk penguatan kompetensi kewarganegaraan. Seperti yang disampaikan Torney-Purta, Schwille, & Amadeo, (1999) menjelaskan pendidikan karakter di banyak negara berfokus pada pembentukan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap keragaman sosial. Sementara itu, Torney-Purta, Schwille, & Amadeo (1999) menjelaskan tantangan utama Pendidikan Kewarganegaraan di 24 negara yaitu keterbatasan waktu dalam kurikulum, kurangnya keterlibatan siswa, dan perubahan sosial yang cepat. Selain itu, responden menyebutkan pentingnya pembelajaran yang berorientasi pada kewarganegaraan global untuk meningkatkan kesadaran akan peran mahasiswa sebagai warga dunia yang bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara responden (18-19 Oktober 2024), permasalahan yang dihadapi mahasiswa yaitu munculnya sifat mahasiswa yang semakin individualis, pelanggaran terhadap tata tertib, kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai moral, dan sosial. Sifat individualis yang disebutkan oleh beberapa responden menunjukkan adanya jarak sosial yang dapat menghambat solidaritas mahasiswa dalam kehidupan berbangsa. Temuan tersebut sejalan dengan temuan dari Branson (2003) mencatat bahwa warga negara muda menunjukkan penurunan dalam keterlibatan politik, *civic virtues*, dan pemahaman prinsip-prinsip demokrasi. Lebih lanjut, Lickona (1977) menjelaskan pentingnya kapasitas untuk berpikir rasional, bertindak sesuai nilai-nilai mereka, dan berkontribusi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang membelajarkan tentang pentingnya kehidupan sosial, membentuk keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. Meskipun,

beberapa responden juga mengidentifikasi bahwa mahasiswa seringkali belum optimal dalam menjaga etika berkehidupan sebagai warga negara dan sebagian lainnya sudah terlibat aktif dalam menyuarakan isu-isu sosial. Responden yang menyebutkan kontribusi mahasiswa dalam menyuarakan isu-isu sosial menunjukkan adanya segmen mahasiswa yang sudah cukup kritis dan aktif secara politik. Boyte (2017) menjelaskan pendapat Dewey tentang lembaga pendidikan sebagai ruang bebas yang potensial bagi politik warga negara yang tidak hanya mengetahui kewarganegaraan tetapi meluas menjadi agen kewarganegaraan. Namun demikian, aktivitas tersebut diarahkan untuk membangun etika berpolitik dan berorganisasi yang sehat, agar tidak menimbulkan konflik horizontal atau polarisasi dalam kehidupan lembaga kemahasiswaan. Untuk mengatasi masalah ini, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu dirancang dengan membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah (*problem solving*) dan mencari informasi yang relevan untuk mengatasi kendala mereka (Assholekhah *et al.*, 2023). Demografi aktivitas responden terdapat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Demografi Responden Di Kampus

Kegiatan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Kuliah Penuh	449	92,2
Kuliah dan Aktivis Organisasi Kemahasiswaan	27	5,55
Kuliah Sambil Bekerja Paruh Waktu	7	1,44
Kuliah dan Aktivis Lembaga Sosial Kemasyarakatan	2	0,41
Kuliah, Aktivis Organisasi Kemahasiswaan,	1	0,20

dan Aktivistik Lembaga Sosial Kemasyarakatan			
Kuliah dan Pondok Pesantren	1	0,20	
Jumlah	487	100	

Berdasarkan Tabel 1 mayoritas responden fokus pada perkuliahan sebanyak 449 orang (92,2%), responden menyatakan fokus penuh pada kegiatan perkuliahan tanpa aktivitas tambahan lainnya. Aktivitas tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar mahasiswa lebih memprioritaskan pendidikan formal sebagai tujuan utama. Kemudian, mahasiswa dengan aktivitas tambahan yaitu aktivis organisasi kemahasiswaan sebanyak 27 orang (5,55%) terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan selain kuliah. Aktivitas ini menunjukkan bahwa meskipun hanya sebagian kecil, ada mahasiswa yang aktif dalam pengembangan diri di luar akademik. Lebih lanjut, responden dengan bekerja paruh waktu sebanyak 7 orang (1,44%) menggabungkan aktivitas kuliah dengan pekerjaan paruh waktu. Aktivitas ini mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara pendidikan dan finansial. Kemudian, aktivis lembaga sosial kemasyarakatan sebanyak 2 orang (0,41%) aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan. Aktivitas lembaga sosial kemasyarakatan yang diikuti yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU). Aktivitas ini menunjukkan minat sebagian kecil mahasiswa untuk berkontribusi di bidang sosial non kampus. Selanjutnya, gabungan aktivitas hanya 1 orang (0,20%) yang menggabungkan aktivitas di organisasi kemahasiswaan dan lembaga sosial kemasyarakatan, serta 1 orang (0,20%) lainnya yang juga terlibat dalam kegiatan pondok pesantren. Jumlah yang sangat kecil ini mencerminkan tantangan dalam mengelola waktu untuk kegiatan dengan beban tinggi. Keseluruhan distribusi otal responden adalah 487 orang dengan distribusi yang sangat dominan pada kelompok yang hanya fokus kuliah, sementara proporsi

kegiatan tambahan relatif kecil, menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memilih untuk tidak membebani diri dengan aktivitas di luar perkuliahan. Sementara itu, berdasarkan asal etnis responden dapat ditampilkan dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Asal Etnis Reponden

Asal Etnis	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jawa	436	89,52
Sunda	23	4,72
Batak	11	2,26
Betawi	9	1,85
Minang	3	0,62
Bugis	3	0,62
Lampung	2	0,41
Jumlah	487	100

Berdasarkan Tabel 2. mayoritas responden berasal dari etnis Jawa (89,52%). Kemudian, diikuti dari etnis Sunda menempati posisi kedua dengan 4,72%. Selain itu, dari etnis lain seperti Batak, Betawi, Minang, Bugis, dan Lampung muncul dengan jumlah lebih kecil.

Berdasarkan analisis komponen Pendidikan Kewarganegaraan terdiri atas *civic knowledge* (pengetahuan warga negara), *civic skills* (keterampilan warga negara), dan *civic disposition* (watak/karakter warga negara) (Branson, 1999). Berdasarkan *civic knowledge* (pengetahuan warga negara) yaitu mayoritas mahasiswa yang hanya fokus pada kuliah penuh (92,2%) cenderung memiliki *civic knowledge* yang bersifat teoritis, terbatas pada materi maupun konsep akademik yang diberikan di kelas. Namun demikian, belum ada analisis apakah responden apatis terhadap politik atau tidak. Tanpa keterlibatan dalam aktivitas sosial atau organisasi, pemahaman mereka tentang penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan kehidupan bermasyarakat bisa jadi kurang mendalam. Sebaliknya, mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan (5,55%) dan lembaga sosial kemasyarakatan (0,41%) memiliki peluang lebih besar untuk mengintegrasikan *civic knowledge* ke dalam pengalaman praktis,

seperti memahami dinamika pengambilan keputusan kolektif, advokasi kebijakan, atau pemecahan masalah sosial. Responden yang bekerja paruh waktu (1,44%) dapat mengembangkan *civic knowledge* melalui interaksi mereka di dunia kerja, terutama jika pekerjaan tersebut melibatkan pelayanan publik atau kegiatan sosial. Namun, jika aktivitas kerja lebih bersifat individual, pengembangan *civic knowledge* mereka mungkin terbatas. Kelompok responden yang terlibat dalam berbagai aktivitas (0,20%) menunjukkan tingkat *civic knowledge* yang tinggi karena mereka memiliki kesempatan untuk memahami dan menerapkan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat secara langsung. Mahasiswa di pondok pesantren (0,20%) juga mengembangkan *civic knowledge* berbasis nilai-nilai moral dan religius, yang dapat menjadi landasan kuat dalam memahami peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Kemudian berdasarkan *civic skills* menunjukkan kelompok responden yang hanya fokus pada kuliah penuh (92,2%) cenderung kurang memiliki peluang untuk mengasah *civic skills* mereka. Aktivitas mereka yang terbatas pada lingkungan akademik membuat keterampilan seperti kerja sama, advokasi, dan komunikasi lintas kelompok kurang terasah. Namun demikian, belum diteliti apakah kerja sama yang dilakukan terbatas pada diskusi kelas atau tugas mata kuliah. Sebaliknya, mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan (5,55%) memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan *civic skills*. Keterlibatan dalam organisasi memberikan pengalaman nyata dalam kepemimpinan, pengelolaan konflik, kerja sama, dan kemampuan berbicara di depan umum. Responden yang bekerja paruh waktu (1,44%) mengembangkan keterampilan seperti manajemen waktu dan tanggung jawab pribadi, tetapi peluang mereka untuk mengasah *civic skills* yang berbasis partisipasi kolektif cenderung terbatas kecuali pekerjaan mereka melibatkan interaksi sosial atau pelayanan publik. Mahasiswa yang aktif di lembaga sosial kemasyarakatan (0,41%)

memiliki tingkat *civic skills* yang tinggi karena aktivitas mereka langsung melibatkan penyelesaian masalah sosial, kerja sama lintas kelompok komunitas, dan advokasi isu-isu publik. Kelompok mahasiswa yang terlibat dalam berbagai aktivitas (0,20%) menunjukkan *civic skills* yang kompleks, karena mereka harus mampu mengelola tanggung jawab dalam berbagai peran sekaligus, seperti di organisasi kampus dan lembaga sosial. Mahasiswa di pondok pesantren (0,20%) mengembangkan *civic skills* berbasis nilai-nilai moral dan agama, seperti keterampilan memediasi konflik dan mempromosikan perdamaian.

Lebih lanjut, berdasarkan *civic disposition* menunjukkan responden yang hanya fokus pada kuliah penuh (92,2%) kemungkinan memiliki *civic disposition* yang kurang berkembang secara praktis. Namun demikian, belum diteliti apakah responden dalam keseharian melaksanakan *civic disposition*. Tanpa keterlibatan dalam aktivitas sosial atau kolaboratif, mahasiswa ini cenderung tidak terpengaruh pada situasi yang menuntut sikap terbuka, empati, atau komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan (5,55%) lebih terlatih dalam mengembangkan *civic disposition*, karena mereka belajar bekerja sama dalam organisasi, menghormati perbedaan pendapat, toleransi, tanggung jawab, dan memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Responden yang bekerja paruh waktu (1,44%) dapat mengembangkan *civic disposition* melalui pengalaman kerja yang melibatkan interaksi sosial, seperti melayani pelanggan atau bekerja dalam kelompok. Namun, jika pekerjaan mereka lebih bersifat individual, pengembangan *civic disposition* masih terbatas. Responden yang aktif di lembaga sosial kemasyarakatan (0,41%) memiliki *civic disposition* yang tinggi, karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan yang mempromosikan solidaritas, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Kelompok kecil mahasiswa yang terlibat dalam berbagai aktivitas (0,20%) menunjukkan *civic*

disposition yang kuat dan kompleks, karena mereka harus mampu menyeimbangkan nilai-nilai demokrasi dalam berbagai konteks, seperti organisasi kampus dan masyarakat luas. Mahasiswa di pondok pesantren (0,20%) juga mengembangkan *civic disposition* yang berakar pada nilai-nilai religius, seperti penghormatan, solidaritas, dan komitmen terhadap kesejahteraan bersama.

Persepsi responden terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi perhatian penting bagi responden meliputi materi bela negara, materi hak asasi manusia, dan materi demokrasi (Wawancara, 18-19 Oktober 2024). Beberapa responden menyebutkan perlunya mahasiswa untuk memahami pelaksanaan penegakan hukum (Wawancara, 18 Oktober 2024). Berdasarkan persepsi responden tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki perhatian terhadap pembentukan karakter sebagai warga negara yang baik sekaligus pemahaman mendalam tentang sistem demokrasi dan hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rusfiana & Abidin (2018) tentang pentingnya internalisasi bela negara di era globalisasi ini yaitu untuk mempertahankan integritas bangsa dan menangkal pengaruh negatif globalisasi di kalangan mahasiswa. Kemudian, Komalasari (2016) menyarankan perlunya pendidikan nilai yang berbasis *living values education* untuk meningkatkan *civic disposition* mahasiswa. Sementara, Cuga (2018) perlunya konten yang berisi pendidikan multikultural. Responden menyebutkan demokrasi dan penegakan hukum mengindikasikan kebutuhan untuk menghubungkan konsep-konsep dalam Pendidikan Kewarganegaraan dengan tantangan dunia nyata, seperti partisipasi dalam proses politik dan penghormatan terhadap supremasi hukum.

Persepsi responden terhadap metode/model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu responden menyarankan berbagai metode pembelajaran untuk menanamkan kompetensi kewarganegaraan, seperti diskusi berbasis opini dalam bentuk esai, metode tatap muka (luring), pembelajaran kooperatif, dan

pendekatan aktif yang mendorong mahasiswa menjadi kritis. Ada pula responden yang menekankan perlunya metode yang bebas tetapi tetap memiliki kerangka yang mendukung kreativitas dan pemikiran kritis mahasiswa (Wawancara, 18-19 Oktober 2024). Persepsi responden untuk menggunakan metode/model pembelajaran yang inovatif ini menunjukkan kebutuhan untuk keluar dari metode pembelajaran tradisional yang bersifat satu arah, menuju pembelajaran yang lebih partisipatif. Komalasari (2009) perlunya pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tidak hanya berfokus pada hafalan tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membekali mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas dan baik berada di interval 7-9 (dalam skala 1-10). Skor interval 7-9 menggambarkan persepsi cukup positif responden terhadap efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Torney-Purta, Schwille, & Amadeo (1999) menjelaskan beberapa negara menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk mengajarkan nilai karakter, misalnya, siswa diajak untuk menyelesaikan masalah komunitas sebagai bagian dari proses pembelajaran. Selain itu, di negara-negara tertentu, pelatihan kepemimpinan dan resolusi konflik dijadikan cara untuk memperkuat karakter siswa. Sejalan dengan temuan tersebut, Branson (2003) merekomendasikan kolaborasi antara akademisi dan praktisi untuk mengembangkan kurikulum berkualitas, melatih guru, dan meningkatkan advokasi publik. Responden merasa agar selalu efektif pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk selalu didukung dengan variasi maupun inovasi dalam metode/model pembelajaran, penanaman karakter, dan menjadi warga negara global yang bertanggung jawab. Implikasi praktis oleh dosen atau institusi

untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa persepsi responden dalam kategori cukup positif terhadap efektivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Semarang. Persepsi responden mendukung Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter. Mereka membutuhkan pelatihan pendidikan karakter untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan. Metode/model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu ditingkatkan dengan model yang kontekstual dengan dengan kondisi kelas masing-masing. Metode/model pembelajaran yang diwajibkan kementerian berupa metode/model *projek based learning* dan *problem based learning* perlu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat diperkuat dengan mengintegrasikan kurikulum kewarganegaraan global. Dengan demikian, mahasiswa dapat menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global sesuai dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assholekhah, F.A., *et al.* (2023). Problem Solving Mahasiswa Dalam Menghadapi Tantangan Dunia Kerja. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(1), 345–352. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i1.1132>.
- Boyte, H.C. (2017). John Dewey and Citizen Politics: How Democracy Can Survive Artificial Intelligence and the Credo of Efficiency. *Education and Culture* 33(2), 13-47. <https://doi.org/10.5703/educationculture.33.2.0013>.
- Branson, M.S. (1999). Belajar Civic Education dari Amerika (Terjemahan Syarifudin dkk). *Yogyakarta: LKIS*.
- Branson, M.S. (2003). The Importance of Promoting Civic Education. The Center for Civic Education Annual Scholars Conference.
- Campbell, D. E. (2019). What Social Scientists Have Learned About Civic Education: A Review of the Literature. *Peabody Journal of Education*, 94(1), 32–47. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2019.1553601>.
- Cogan, J. J. (2000). Citizenship Education for The 21st Century: Setting The Context. *Citizenship for the 21st century: An International Perspective On Education*, 1-21.
- Cuga, C. (2018). Civic Education As Vehicle Of Multicultural Education In Building Democratic Citizen. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 160-167). Atlantis Press.
- Galston, W. A. (2007). Civic Knowledge, Civic Education, and Civic Engagement: A Summary Of Recent Research. *International Journal of Public Administration*, 30(6-7), 623-642.
- Hidayah Y. & Ulfah R. A. (2020). Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4(2), 275-281. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p275-281>.
- Katz, R., *et al.* (2021). Gen Z, explained: The art of living in a digital age. In *Gen Z, Explained*. University of Chicago Press.
- Komalasari, K. (2009). The Effect of Contextual Learning In Civic Education On Students' Civic Competence. *Journal of Social Sciences*, 5(4), 261-270.
- Komalasari, K. (2016). Living Values Education in Teaching Materials To Develop Students' Civic Disposition. *The new educational review*, 44(1), 107-121.
- Lickona, T. (1977). An Integrated Approach to Moral, Value, and Civic Education with Adolescents: An Analysis of Current Theory and Practice and

- Recommendations for Program Implementation. *Institute of Educational Sciences*.
- Novitasari, N *et al.* (2021). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penilaian Teman Sejawat Secara Daring Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Tidar. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v9i1.10001>.
- Rusfiana Y & Abidin, Z. (2018). Urgensi Internalisasi Nilai Bela Negara Dikalangan Mahasiswa dan Tantangan Integritas Bangsa Di Era Globalisasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4(3). <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i3.1641>.
- Saddam, *et al.* (2018). The Integration Strategy of Conservation Values in Habituation of Semarang State University Campus. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v1i2.2124>.
- Sujana, I. P. W. M., *et al.* (2020). Representasi Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Tinggi Dilihat dari Perspektif Generasi Millennial. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 10(2), 125–135. <https://doi.org/10.21067/jip.v10i2.4550>.
- Torney-Purta, J., Schwille, J., & Amadeo, J. A. (1999). *Civic education across countries: Twenty-four national case studies from the IEA civic education project*. IEA Secretariat, Herengracht 487, 1017 BT, Amsterdam, The Netherlands.
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237-269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>.
- Yin, R.K. (2014). Case Study Research Design and Methods. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 108-110.
- Yusra, SAZ *et al.* (2024). Persepsi Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terhadap Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Indonesia Journal of Education and Development Research*. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i2.2045>.